

Kinerja Kebijakan *One Village One Product* (OVOP) dalam Peningkatan Potensi Ekonomi di Kabupaten Brebes

Ashwar Anis¹⁾

¹⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Peradaban
E-mail: asni_bmy@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study is to investigate and analyze the performance as a form of policy successes One Village One Product (OVOP) in Brebes Regency. This research uses descriptive qualitative research with the aim of providing a picture or describe the state of the object. The study was conducted in the Brebes Regency, covering areas that were targeted OVOP program, and the Department of Industry and Trade Office Department of Cooperatives and UKM As well as the center of the main data source. Descriptive qualitative data analysis, which illustrate the descriptions based on the data available on the object of research. The results show the achievement of performance OVOP policy in improving the welfare of the community in Brebes Regency has not reached optimal results, from some of the leading products available in the Brebes Regency, two new products, the main target is the implementation of OVOP programs salted egg and seaweed, while the center other products are still in development stage. However, of the activities that have been done show a considerable increase prospectively, including an increase in the volume of production and the birth of new product variants as a result of the coaching and development of creativity and innovation entrepreneurs. As a supporter of factors, including Brebes Regency Government has a strong commitment to implement the OVOP program on an ongoing basis, so as to exploit the full potential that can be used as a superior product. Availability of funds, human resources and compliance infrastructure needs, especially for the target group can be used as capital to implement the OVOP activities thoroughly. The stages of activities have been implemented in an integrated manner and in accordance with their respective authorities, although there are indications of overlapping authorities in carrying out coaching because there are no clear boundaries in determining the category of individual businesses, and industry groups.

Keywords: *performance policy, One Village One Product (OVOP), economic potential*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka mempercepat pengembangan industri kecil menengah (IKM), maka dilaksanakan program pengembangan IKM dengan pendekatan OVOP (*One Village One Product*). Program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan IKM melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk di Sentra.

Produk Unggulan Kabupaten Brebes sebagai komoditas andalan yang memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2001, maka yang menjadi Produk unggulan yang berkembang di Kabupaten Brebes sampai saat ini antara lain: Telor Asin, Bawang Merah, Keramik Hias, Tali Kapal, Rebana dan Batik Tulis, saat ini produk-produk tersebut telah mampu disejajarkan dengan produk sejenis dengan daerah lain. Terbukti produk tersebut bukan hanya terkenal tapi juga mampu menembus pasar regional, nasional dan internasional.

Tabel 1. Produk Unggulan Kabupaten Brebes

No	Jenis Produk	Keunggulan	Sentra Produk
1	Bawang Merah Varietas Bima	1) Hampir 60% petani Brebes menanam bawang merah sebagai komoditi tanaman utamanya 2) Paling unggul dibandingkan varietas lain yang ada di Indonesia 3) Menghasilkan sampai 10 ton umbi kering per hektar 4) Panen pada umur 60 hari 5) Resisten (tahan) terhadap penyakit	Wilayah Brebes Bagian Utara
2	Telor Asin	1) Merupakan telur asin nomor 1 di Indonesia 2) Rasa yang tidak terlalu asin 3) Warna kuning telur yang terang pekat 4) Berminyak khas di dalam telur asin 5) Masir, gurih dan bahkan enak untuk kudapan/ dimakan 6) Kaya akan gizi dan protein 7) Tidak menimbulkan bau amis 8) Rasa asin tidak menyengat 9) Harga yang terjangkau	Kota Kabupaten Brebes, Jalur Utama Tegal-Cirebon

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Brebes (2013)

Tabel 1. Produk Unggulan Kabupaten Brebes (lanjutan)

No	Jenis Produk	Keunggulan	Sentra Produk
3	Batik Brebesan/Salem	<ol style="list-style-type: none"> 1) Teknik pewarnaan kain dengan menggunakan malam untuk mencegah pewarnaan sebagian dari kain (<i>wax-resist dyeing</i>). 2) Memiliki kekhasan, dalam inovasinya kini motif dari batik salem menggambarkan produk unggulan kota Brebes, seperti motif bebek dan juga bawang merah, kopi pecah, mangga, merak, ukel kangkung, sinar rantai 	Kecamatan Salem
4	Keramik Hias	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki nilai artistik cukup tinggi sehingga tidak kalah dibandingkan dengan kerajinan keramik Cina 2) Para pengrajin terampil membuat kerajinan gerabah dan juga terampil membuat kerajinan keramik seperti guci dan piring keramik hias 3) Produksi rata-rata per tahun keramik hias Kabupaten Brebes mencapai 42.000 buah 4) Pemasaran keramik hias Brebes seperti di kota-kota besar di Jawa, juga dipasarkan ke Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi 	Kecamatan Banjarharjo, Ketanggungan, dan Songgom
5	Rebana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pilihan bahan kulit kambing, sapi, Kerbau 2) Tahan Lama 3) Suara yang dihasilkan tidak pudar 	Kecamatan Bumiayu, Sentra Kaliwadas
6	Tali Kapal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki berbagai ukuran 2) Ukuran sesuai pesanan 3) Kuat 	Jalur alternatif Pejagan (Brebes) - Prupuk (Tegal) Desa Kubangwungu kecamatan Ketanggungan
7	Peternakan bebek DOD (<i>Duck Old Day</i>)	Untuk memenuhi pasokan telur Asin	Kecamatan Brebes, Wanasari,

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Brebes (2013)

Tabel 1. Produk Unggulan Kabupaten Brebes (lanjutan)

No	Jenis Produk	Keunggulan	Sentra Produk
8	Budidaya Ikan Patin	1) Letak sentra strategis, 2) Kolam pengembangan luas 3) Produktivitas stabil 4) Harga bersaing	Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung dan Losari
9	Rumput Laut	Produksi mencapai 1.000 ton rumput laut kering per bulan, Tersedia beberapa jenis olahan	Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung dan Losari

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Brebes (2013)

Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas terkait yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMKM telah melakukan beberapa kegiatan yang sifatnya mengangkat produk unggulan tersebut, baik ditingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Brebes juga melakukan Pembinaan OVOP berbasis koperasi sekaligus memberikan bantuan peralatan kepada kelompok UMKM secara langsung. Atas dasar potensi yang ada di kabupaten Brebes khususnya mengenai produk unggulan Kabupaten Brebes maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kinerja Kebijakan One Village One Product (OVOP) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Brebes?”.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kebijakan Publik

Kebijakan publik bermula dari pengaturan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Masyarakat sangat membutuhkan suatu keputusan atau kebijakan publik untuk mengatur semua kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kebijakan publik disebabkan karena adanya gejala yang muncul atau dirasakan di dalam masyarakat. Kebijakan tidak hanya terbatas pada keadaan dalam organisasi saja yang bersifat entropi akan tetapi lebih dinamis karena bersumber dari masyarakat.

Anderson dalam Wahab (2002:5) memandang kebijakan sebagai suatu keputusan yang diambil pemerintah dan dipengaruhi berbagai aktor yang berkepentingan dalam upaya menyelesaikan suatu masalah publik. Aktor-aktor tersebut seperti; pemerintah, pengusaha, akademisi, LSM, bahkan masyarakat itu sendiri. Pendapat tersebut sangat relevan dengan kondisi saat ini, dimana besarnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, apalagi yang bersangkutan langsung dengan masalah publik.

Selanjutnya dikatakan bahwa dalam hubungannya dengan tindakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan di masyarakat, kebijakan adalah keputusan pemerintah atau langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang terjadi. Istilah kebijakan pemerintah sering disamakan dengan istilah kebijakan negara, bahkan lebih sering disebut kebijakan publik. Menurut Jones (1996:13) kebijakan terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Goal atau tujuan yang diinginkan.

- 2) Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan.
- 3) Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.
- 4) Decision atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- 5) Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).

Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Kebijakan publik merupakan pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, sosial, ekonomi, pertanian, industri, pertanahan, dan sebagainya (Subarsono, 2006:2). Selanjutnya pengertian kebijakan menurut Fredrickson dan Hart dalam Hesel (2003:19) yaitu suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Sedangkan Solihin Abdul Wahab dalam bukunya pengantar analisis kebijakan public (2008:40), menyatakan bahwa konsep kebijakan itu memang sulit untuk dirumuskan dan diberikan makna tunggal, sebagai sebuah gejala yang khas dan konkret. Dimana beliau menyodorkan keberagaman pendapat dari para ahli mengenai kebijakan publik antara lain: Hecllo (1972: 84) mengatakan bahwa “policy is not self evident term” (kebijakan bukanlah sebuah istilah yang jelas dengan sendirinya), karena itu Hecllo menyarankan dan sekaligus menunjukkan, bahwa “kebijakan itu lebih baik jika dipandang sebagai tindakan yang sengaja dilakukan atau ketidakmauan untuk bertindak secara sengaja dilakukan dari pada dipandang sebagai keputusan-keputusan atau tindakan tertentu” (hal.85). Dalam alur pikiran yang hampir sama David Easton menyatakan bahwa “a policy consist of a web decisions and action that allocate values” (1953: 130) (Kebijakan terdiri dari serangkaian keputusan dan tindakan untuk mengalokasikan nilai-nilai).

Pendapat lain dikemukakan oleh Jenkins, yang memandang kebijakan sebagai “a set of interrelated decision concerning the selection of goal and the means of achieving them within a specified situation (Jenkins, 1978: 15) (serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu). Friend mengatakan bahwa “policy is essentially a stance which, once artivulated, contributes to the context within which a secession of future decision will be made” (1974: 40) (kebijakan pada hakekatnya adalah suatu bentuk penyikapan tertentu yang, sekali dinyatakan, akan mempengaruhi keberhasilan keputusan-keputusan yang akan dibuat).

Dari beberapa pendapat tentang pengertian kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dengan melibatkan stakeholder yang ada, untuk menyelesaikan suatu masalah publik. Dalam teori kebijakan publik terdapat beberapa hal yang menjadi ciri-ciri dari kebijakan publik, diantaranya:

- 1) Dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah
- 2) Ditujukan untuk kepentingan masyarakat
- 3) Serangkaian tindakan berorientasi pada tujuan
- 4) Kebijakan dibuat untuk mengatasi masalah tertentu
- 5) Rangkaian kegiatan tidak berdiri sendiri

Suatu kebijakan disusun berdasarkan kepentingan publik atau masyarakat luas. Kebijakan yang telah disusun dan diterapkan oleh pemerintah merupakan sejumlah aktivitas pemerintah dalam upaya memecahkan permasalahan yang muncul dalam masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jadi suatu kebijakan publik akan berorientasi pada pemecahan masalah-masalah riil yang terjadi di tengah masyarakat.

Kebijakan sebagai instrumen pengelolaan pemerintahan merupakan mata rantai utama dalam operasionalisasi fungsi pemerintahan (governance). Sebagai mata rantai utama, jika kebijakan itu keliru atau tidak tepat dalam menangani persoalan di dalam negara, konsekuensinya adalah kegagalan pemerintah dalam fungsi implementatifnya. Permasalahan kebijakan yang terjadi umumnya baru dirasakan saat sebuah kebijakan tersebut dilaksanakan, para pembuat kebijakan (policy maker) atau pelaksana (implementor) baru menjerit dan sadar akan kesalahannya ketika terjadi kondisi implementasi yang buruk (bad implementation).

Kinerja Kebijakan

Bastian (2006: 274) mengartikan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan suatu organisasi maka seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat diukur. Dalam pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada masukan (input), tetapi lebih ditekankan kepada keluaran (output) atau manfaat (benefit) program tersebut.

Mardiasmo (2005: 121) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk tiga hal. Pertama ukuran kinerja sektor publik digunakan membantu memperbaiki kinerja pemerintah agar berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan elemen indikator kinerja. Elemen yang terdapat dalam indikator kinerja menurut Bastian (2006: 267) berupa: indikator masukan (input), indikator proses (process), indikator keluaran (output), indikator hasil (outcome), indikator manfaat (benefit), indikator dampak (impact). Lebih jelasnya uraian tentang masing-masing indikator dijelaskan sebagai berikut:

a. **Indikator Masukan (Input)**

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana dan sumber daya manusia, informasi, kebijakan/ peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Dengan meninjau distribusi sumber daya, sesuatu lembaga menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang telah diterapkan.

b. **Indikator Proses (Process)**

Proses berbicara mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan organisasi. Ukuran yang menjadi dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi. Efisiensi berarti besarnya hasil yang diperoleh pemanfaatan sejumlah input. Sedangkan ekonomis yang dimaksud adalah bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut secara lebih murah dibandingkan dengan standar biaya atau waktu yang ditentukan untuk itu.

c. Indikator Keluaran (Output)

Indikator keluaran adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non-fisik. Dengan membandingkan keluaran instansi dapat menganalisis apakah suatu kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Tetapi indikator kinerja harus dibandingkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan teratur. Jadi, indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan kegiatan instansi.

d. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil adalah segala sesuatu hasil yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

e. Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).

f. Indikator Dampak (Impact)

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan. Indikator ini sulit diukur karena memerlukan waktu lebih dari satu periode untuk mengetahui dampaknya.

Keenam indikator di atas secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran/program. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program OVOP di Kabupaten Brebes.

Selanjutnya siklus pengukuran kinerja menurut Bastian (2006 : 281) “Terdapat 5 (lima) tahap untuk melakukan pengukuran kinerja yaitu Penskemaan Strategik, Penciptaan Indikator, Pengembangan Sistem Pengukuran Data, Penyempurnaan Ukuran Kinerja dan Pengintegrasian dengan Proses Manajemen”. Berikut uraian masing-masing tahap sebagai berikut:

a. Perencanaan Strategik

Perencanaan strategik, berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran, kebijakan, program operasional dan kegiatan/aktivitas.

b. Penetapan Indikator Kinerja

Menyusun dan menetapkan ukuran/indikator kinerja. Untuk beberapa jenis program, indikator kinerja dapat berupa indikator Input, Process, Output, Outcomes, Benefit dan Impacts.

c. **Mengembangkan Sistem Pengukuran Kinerja**

Terdapat tiga kegiatan dalam tahap ini, yaitu: Pertama, harus yakin bahwa mempunyai data atau pencarian data yang diperlukan terus dilanjutkan sesuai dengan siklus pengukuran kinerja. Kedua, mengukur kinerja harus mengumpulkan data. Terakhir, menggunakan data pengukuran kinerja yang dihimpun, dan hal ini harus dipresentasikan dengan cara yang dapat dimengerti.

d. **Penyempurnaan Ukuran**

Pada tahapan ini, pemikiran atas indikator hasil (outcomes) dan indikator dampak (impacts) menjadi lebih penting dibandingkan pemikiran atas indikator masukan (inputs) dan keluaran (outputs).

e. **Pengintegrasian dengan Proses Manajemen**

Pada saat ukuran kinerja tersedia, tantangan selanjutnya adalah mengintegrasikan pengukuran kinerja dengan proses manajemen.

One Village One Product (OVOP)

One Village One Product (OVOP) adalah suatu gerakan masyarakat yang secara integratif berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dan kekayaan daerah, meningkatkan pendapatan para pelaku usaha dan masyarakat sekaligus meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan terhadap kemampuan yang dimiliki masyarakat dan daerahnya. Sumber daya alam ataupun produk budaya lokal serta produk khas lokal yang telah dilakukan secara turun temurun dapat digali dan dikembangkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi sesuai tuntutan dan permintaan pasar. Dengan pembagian peran yang jelas dari masing-masing pemangku kepentingan, adanya perencanaan yang baik, adanya tahapan kegiatan dan komitmen bersama pemangku kepentingan untuk memperkuat IKM di tanah air, maka peningkatan efektivitas pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP di sentra diharapkan dapat dicapai (Dirjen IKM, 2012:1).

OVOP yang di Indonesia akan menjadi Satu Desa Satu Produk adalah pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah (maksud dan pengertian satu desa dapat diperluas menjadi kecamatan, kabupaten/kota, maupun kesatuan wilayah lainnya sesuai dengan potensi dan skala usaha secara ekonomis) untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumberdaya lokal. OVOP bertujuan untuk menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif lokal berdasarkan potensi sumberdaya yang ada, bersifat unik khas daerah, bernilai tambah tinggi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan (Lili, 2009:14).

Adapun tujuan program dari pengembangan IKM dengan pendekatan OVOP di sentra adalah untuk:

- 1) Mempercepat pengembangan IKM,
- 2) Mengembangkan potensi produk unggulan dan memiliki keunikan daerah menjadi produk kelas dunia,
- 3) Meningkatkan pendapatan dan membangun kebanggaan masyarakat daerah yang memiliki produk unggulan dan unik di pasar global.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dalam implementasi program OVOP adalah:

- 1) Kerjasama dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan
- 2) Membangun sustainability (kesinambungan) berbagai aktivitas di perdesaan/daerah, yang antara lain dapat dilaksanakan melalui manajemen rantai

- suplai (supply chain management), penempatan kelembagaan korporasi dan peningkatan infrastruktur
- 3) Menghasilkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para petani/ pelaku usaha serta masyarakat disekitarnya
 - 4) Meningkatkan posisi tawar (bargaining position) terhadap pasar untuk para pelaku usaha/petani.

Potensi Ekonomi

Pengertian potensi adalah suatu kemampuan, kesanggupan, kekuatan ataupun daya yang mempunyai kemampuan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar (Majdi, 2017). Sedangkan definisi potensi sendiri adalah suatu bentuk sumber daya atau kemampuan yang cukup besar namun kemampuan tersebut belum tersingkap dan belum diaktifkan. Atau dalam definisi yang lain potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan masih tersembunyi, atau keberhasilan yang belum diraih padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut (Myles Monru).

Potensi dalam kegiatan bidang ekonomi berarti memiliki arti pengertian sesuatu yang dapat dikembangkan atau dapat ditingkatkan pemanfaatan nilainya. Jika kata ini dikaitkan dengan sumber daya alam, maka berarti menggali nilai manfaat sumber daya alam yang lebih mengarah kepada kegiatan bentuk ekonomi. Sebagai contohnya potensi dalam kegiatan bentuk ekonomi sumber daya perairan, berarti kata potensi di sini memiliki arti bahwa kita berusaha meningkatkan atau mengembangkan potensi sumber daya perairan agar memiliki nilai guna pada bidang ekonomi.

Untuk menggali potensi ini maka dibutuhkan aktivitas atau kegiatan dalam bentuk ekonomi yang bisa menggali & meningkatkannya. Sebagai contoh yaitu untuk meningkatkan potensi sumber daya perairan maka harus ada kegiatan yang kita lakukan untuk meningkatkan nilai manfaatnya. Misalnya dengan melakukan kegiatan budidaya ikan kerambah, kegiatan budidaya rumput laut serta kegiatan lainnya dimana bila meningkatkan nilai ekonomi dari sumber daya alam tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan agar temuan penelitian dapat menggambarkan pelaksanaan program OVOP di Kabupaten Brebes sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif mengenai fenomena tersebut. Peneliti menetapkan informan secara *purposive* yang dianggap paling mengetahui dan dapat dipercaya untuk menjadi nara sumber yang mengetahui masalah secara mendalam. Model analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data interaktif (*interactive model of analysis*) yang terdiri dari tiga komponen pokok dalam analisis interaktif, yaitu: reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan. Selanjutnya, validasi data menggunakan tehnik triangulasi sumber data.

HASIL DAN ANALISIS

Dalam rangka mempercepat pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), maka dilaksanakan program pengembangan IKM dengan pendekatan OVOP (*One Village One Product*) di sentra. Program Pengembangan UMKM dengan pendekatan

OVOP berbasis koperasi pada dasarnya merupakan program insentif dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha dalam rangka mempercepat pengembangan produk unggulan khas/unik daerah untuk mampu menembus pasar global. Pendekatan OVOP akan mendorong perbaikan kualitas dan kuantitas produk unggulan daerah dan mengantarkannya ke pasar global.

Program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan IKM melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product-OVOP*) di Sentra. Sentra OVOP merupakan wilayah Desa atau Kecamatan dimana produk IKM sebagai produk OVOP diproduksi. Homogenitas produk, lokasi, akses jalan, sumber bahan baku, sumberdaya manusia, serta komitmen pemerintah daerah merupakan pertimbangan utama dalam penentuan wilayah/sentra IKM sebagai sentra OVOP.

OVOP merupakan program berbasis kemasyarakatan yang berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dan kekayaan daerah, meningkatkan pendapatan para pelaku usaha dan masyarakat sekaligus meningkatkan kebanggaan terhadap kemampuan yang dimiliki masyarakat dan daerahnya secara integratif. Sumber daya alam ataupun produk budaya lokal serta produk khas lokal yang dimiliki dapat digali dan dikembangkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi sesuai tuntutan dan permintaan pasar. OVOP diharapkan dapat memperkuat IKM, termasuk koperasi dan UMKM melalui pembagian peran yang jelas dari masing-masing pemangku kepentingan, adanya perencanaan yang baik, adanya tahapan kegiatan dan komitmen bersama pemangku kepentingan untuk memberikan kontribusi yang signifikan pada sektor industri dan menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah terutama di wilayah pedesaan.

Hasil penelitian tentang pelaksanaan program OVOP di Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa program OVOP di Kabupaten Brebes memiliki dukungan *input* yang baik, diantaranya dukungan sepenuhnya oleh Bupati. Dana yang tersedia untuk melaksanakan program sangat mencukupi untuk melaksanakan program, baik dana yang bersumber dari APBD I dan APBD II, maupun bantuan dana dari Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan pembinaan dan bantuan peralatan bagi kelompok UMKM yang memiliki potensi.

Pemerintah Daerah memberikan dukungan sepenuhnya terhadap program OVOP. pelaksanaan program OVOP tidak hanya menjadi kewenangan satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetapi melibatkan beberapa SKPD, termasuk pemerintahan desa. Tetapi dalam pelaksanaannya, dalam hal ini diketahui bahwa terdapat tumpang tindih kewenangan antara kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Kondisi SDM yang tersedia masih belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Brebes secara optimal, tetapi dengan terintegrasinya kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, maka kegiatan pembinaan OVOP dapat dilaksanakan dengan baik. Namun demikian kelompok sasaran masih membutuhkan SDM yang dapat mendampingi secara rutin khususnya untuk mengembangkan kegiatan kewirausahaan.

Tabel 2. Inovasi Produk Unggulan OVOP

No	Produk	Varian Lama	Varian Baru
1	Telur Asin	Rebus	Panggang, Bakar, Oven
2	Rumput Laut	Keripik	Olahan Makanan dan Minuman, komoditas ekspor ke Jepang, China
3	Batik	Motif Kembang, Buah, Tumbuhan	Motif produk unggulan, Kopi Pecah, Bawang Merah, Bebek

Sumber: Data Primer (2014)

Munculnya varian produk unggulan yang baru merupakan pencapaian dari peningkatan inovasi para pengrajin serta pelaksanaan pembinaan kelompok OVOP dalam menghadapi persaingan secara global. Untuk melaksanakan program OVOP, maka disusun petunjuk teknis untuk menjadi pedoman bagi stakeholder baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat. Dalam buku Petunjuk teknis ini dijelaskan tentang cara:

1. Seleksi sentra OVOP;
2. Seleksi produk OVOP;
3. Penilaian dan penetapan klasifikasi produk OVOP;
4. Kelembagaan pengembangan produk OVOP;
5. Pembinaan Sentra OVOP dan Produsen produk OVOP;
6. Penghargaan OVOP;
7. Program kegiatan tahun 2012 -2013.

Seperti halnya ketersediaan anggaran dan SDM, dukungan sarana prasarana khususnya bagi kelompok sasaran sudah cukup baik, untuk melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan kelompok sasaran diantaranya diberikan melalui bantuan peralatan produksi, peralatan kemasan, dan pembentukan sentra. Dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan program OVOP sudah cukup baik. Tetapi tidak berarti seluruh bantuan sarana prasarana disalurkan melalui Dinas Koperasi dan UMKM, dapat juga melalui dinas perindustrian, dan dinas lain yang terkait dengan bidang utama kegiatan yang dilakukan oleh kelompok OVOP, seperti Dinas pertanian untuk bantuan benih bawang merah dan pupuk, dinas peternakan untuk bantuan pencegahan penyakit pada hewan ternak, dan lain sebagainya. Pemerintah kabupaten Brebes juga mengelola pasokan bahan baku agar proses produksi yang telah berkembang tidak mengalami kendala dalam proses produksi karena kekurangan bahan baku. Bahan baku juga direncanakan dapat diproduksi di Kabupaten Brebes sehingga dapat memperlancar proses produksi dan menekan biaya sehingga dapat menciptakan harga jual yang bersaing.

Output yang telah dicapai diantaranya memperluas pemasaran lokal, regional dan pasar internasional, seperti produk rumput laut yang diekspor ke Jepang dan China. Keluaran program OVOP yang dapat dirasakan manfaatnya adalah terbukanya jaringan pasar yang lebih luas bahkan menembus tingkatan pasar regional dan pasar internasional dari kegiatan pameran dan workshop yang diselenggarakan oleh pemerintah. Meningkatnya ketrampilan kelompok usaha sehingga mampu menciptakan jenis produk baru dari bahan baku yang sama, serta terpenuhinya kebutuhan peralatan produksi sehingga masing-masing kelompok sentra OVOP dapat meningkatkan volume produksi.

Tabel 3. *Output* Program OVOP

Tahun	Sasaran Sektor Usaha	Pelatihan	Pameran/ Workshop DBHCT	Bantuan Peralatan	OVOP
2009	24	3	1	24	-
2010	15	3	1	15	-
2011	12	-	1	12	-
2012	24	6	3	15	-
2013	29	6	3	24	12

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM (2014)

Tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang menyangkut kepentingan banyak pihak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan program OVOP Kabupaten Brebes memperoleh hasil yang lebih besar dibandingkan sebelum pelaksanaan program OVOP. Diantaranya dapat dilihat dari volume produksi, perkembangan jumlah unit usaha, kapasitas produksi, omzet dan perkembangan asset, seperti disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. *Outcomes* Program OVOP

Tahun	Jumlah UMKM	Jumlah UMKM				
		Makanan Ringan	Telur Asin	Batik	Rumput laut	Rebana
2012	1.300	991	5	22	11	271
2013	1.368	1.043	6	23	11	285
2014	1.440	1.098	6	24	12	300

		Kapasitas Produksi				
		Makanan Ringan (Kg)	Telur Asin (Butir)	Batik (Buah)	Rumput Laut (Kg)	Rebana (Buah)
2012		57.246	15.252	1.137	3.641	3.249
2013		60.259	16.055	1.197	3.832	3.420
2014		63.431	16.900	1.260	4.034	3.600

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM (2014)

Pelaksanaan program OVOP di Kabupaten Brebes belum memiliki dasar hukum yang kuat karena belum ada peraturan daerah yang secara khusus menetapkan pelaksanaan program OVOP, tetapi dalam pelaksanaannya SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai adalah Dinas Koperasi dan UMKM. Serta memberdayakan kelompok usaha dan pemerintahan desa/kelurahan untuk menggali potensi yang dapat dijadikan produk unggulan pemerintahan lokal khususnya pelaku usaha dalam rangka mempercepat pengembangan produk unggulan khas/unik daerah untuk mampu menembus pasar global. Pendekatan OVOP akan mendorong perbaikan kualitas dan kuantitas produk unggulan daerah dan mengantarkannya ke pasar global sehingga dengan sendirinya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya karena meningkatnya nilai dan jumlah produksi yang dihasilkan. Proses pelaksanaan program OVOP perlu melibatkan seluruh pihak, tidak hanya pemerintah dengan

kelompok sasaran, tetapi juga masyarakat umum yang dapat menjadi konsumen potensial, serta pemerintahan desa/ kelurahan.

Bentuk evaluasi terhadap kegiatan OVOP sudah dilaksanakan dengan lancar, meliputi perkembangan produksi, variasi produk, kualitas, omzet dan berbagai kendala yang dihadapi. Dari hasil evaluasi yang secara rutin dilaksanakan diketahui bahwa beberapa sentra mengalami kesulitan pemasaran produk karena sepi pasar atau permintaan, sebaliknya untuk produk OVOP unggulan seperti telur asin dan rumput laut menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, bahkan varian produknya semakin berkembang.

Temuan penelitian ini mendukung hasil studi yang dilakukan oleh Triharini et al (2012:28-41) dimana dijelaskan, Pemerintah Indonesia melaksanakan program OVOP sebagai salah satu upaya untuk memajukan potensi industri kecil dan menengah kerajinan di daerah. Memajukan potensi produk kerajinan tidak hanya bertujuan untuk memajukan perekonomian pengrajinnya, tetapi juga melestarikan nilai-nilai tradisional yang dikandung dalam produk, seperti keahlian yang diturunkan dari generasi ke generasi. Penerapan OVOP dalam rangka memajukan industri kerajinan memerlukan adanya strategi khusus yang sesuai dengan prinsip mendasar OVOP dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh industri kerajinan. pelaksanaan program OVOP di beberapa wilayah belum sesuai dengan prinsip-prinsip OVOP secara keseluruhan. Hal tersebut ditunjukkan dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk bersaing di pasar global yang sebenarnya dari produk yang dihasilkan belum dapat dilihat. Seharusnya pengembangan produk melalui program OVOP difokuskan pada pengembangan IKM kerajinan agar dapat menghasilkan produk yang bermuatan lokal dan dapat bersaing di pasar global.
2. Prinsip *self-reliance and creativity* tidak teridentifikasi dalam penerapan OVOP di Plered yang disebabkan karena program OVOP yang bersifat *top-down* dari pemerintah pusat dan sosialisasi dari program OVOP yang relatif baru. Program OVOP yang disusun oleh pemerintah belum menitikberatkan pada pengembangan motivasi dan kreativitas pengrajin/pengusaha. Program OVOP juga belum dititikberatkan kepada pengembangan kemandirian atau pemberdayaan masyarakat setempat.
3. Prinsip *human resources development* belum nampak dalam pelaksanaan program OVOP di beberapa daerah. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya pembinaan terhadap masyarakat setempat selain pengrajin/ pengusaha.

Pemerintah Kabupaten Brebes telah memberikan dukungan dan fasilitas bagi kelompok UMKM untuk meningkatkan produk dan memasarkan produk-produk yang dihasilkan agar dapat menjadi produk unggulan masing-masing daerah, tetapi dari kegiatan tersebut belum nampak kemandirian para pelaku usaha, sehingga ketika secara perlahan dilepas dari binaan pemerintah kelompok tersebut cenderung akan menurun kembali. Keluaran program OVOP yang dapat dirasakan manfaatnya adalah dengan sendirinya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya karena meningkatnya nilai dan jumlah produksi yang dihasilkan, meningkatnya keterampilan kelompok usaha sehingga mampu menciptakan jenis produk baru dari bahan baku yang sama, terpenuhinya kebutuhan peralatan produksi sehingga masing-masing kelompok sentra OVOP dapat meningkatkan volume produksi, serta terbukanya jaringan pasar yang lebih luas dari kegiatan pameran dan workshop yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Beberapa faktor penting bagi para pengelola UMKM adalah tingkat pemasaran yang tinggi sehingga dapat mengembangkan volume produksi dan meningkatnya modal usaha yang harus disediakan untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih maju dan mandiri, tidak lagi tergantung dengan pemerintah. Manfaat yang telah diterima oleh kelompok sasaran dan pemerintah, diantaranya kelompok UMKM lebih berdaya memiliki kemampuan untuk meningkatkan volume produksi dan kualitas produk yang lebih baik. Kelompok UMKM juga memiliki akses untuk meningkatkan jaringan pemasaran, dan pengembangan ketrampilan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Selain itu OVOP memberikan manfaat yang banyak kepada anggota termasuk kepada masyarakat pada umumnya. Program pembinaan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berwirausaha khususnya mengembangkan produk unggulan yang sudah ada.

Lili (2009) menjelaskan beberapa model program sejenis OVOP di beberapa negara diantaranya melalui program sejenis OVOP ini beberapa negara di Asia Tenggara menemukan keunggulan bersaing berdasarkan potensi sumberdaya dan *competitiveness* masing-masing produk negara tersebut. Satu produk adalah pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumberdaya lokal. Malaysia yang menerapkan *codes* untuk industri minyak sawitnya dan dalam kaitan produk pangan halal, negara ini disiapkan menjadi hub untuk pemasaran internasional. Thailand melaksanakan program *One Tambon One Product* (OTOP) untuk mengurangi kemiskinan sehingga dapat dengan mantap memasuki era industri yang berbasis pertanian. Pemerintah Thailand menerapkan kebijakan proteksi dalam hal harga pada produk potensial seperti perkebunan karet. Selanjutnya menjelaskan efektivitas dan keberhasilan OVOP tidak lepas dari 6 kunci sukses pelaksanaannya, yaitu: 1) kesadaran dan pemahaman SDM tentang OVOP, 2) menggali potensi yang tersembunyi dari masing-masing desa/wilayah. 3) memperhatikan produk-produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, 4) melanjutkan percobaan-percobaan dan usaha-usaha yang terus-menerus, 5) membangun pasar dan saluran distribusi, 6) pembinaan bakat dan kreativitas SDM.

Pengembangan koperasi dan UMKM melalui pendekatan OVOP di sentra adalah dalam rangka meningkatkan efektifitas pembinaan secara terintegrasi dari para stakeholder. Diharapkan gerakan ini secara cepat menumbuh-kembangkan berbagai potensi sumberdaya dan kearifan lokal daerah menjadi produk bernilai tambah tinggi, yang mampu bersaing dan mampu memasuki pasar global. Percepatan pengembangan IKM sangat penting untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengkajian terhadap aspek kinerja program *One Village One Product* (OVOP) di Kabupaten Brebes, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut.

1. Pencapaian kinerja kebijakan OVOP dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Brebes belum mencapai hasil yang optimal, dari beberapa produk unggulan yang tersedia di Kabupaten Brebes, baru dua produk yang menjadi sasaran utama pelaksanaan program OVOP yaitu telur asin dan rumput laut, sedangkan sentra produk yang lain masih pada tahap pembinaan. Program OVOP memberikan kontribusi terhadap peningkatan konsumen lokal, pemasaran tingkat regional dan internasional. Namun demikian dari kegiatan yang

- telah dilakukan menunjukkan peningkatan yang cukup prospektif, diantaranya peningkatan volume produksi dan lahirnya varian produk yang baru sebagai buah dari pembinaan dan pengembangan kreativitas dan inovasi para pelaku usaha.
2. Sebagai faktor pendukung, diantaranya Pemerintah Kabupaten Brebes memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan program OVOP secara berkesinambungan, sehingga dapat menggali seluruh potensi yang dapat dijadikan produk unggulan. Ketersediaan dana, SDM dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana khususnya bagi kelompok sasaran dapat dijadikan modal untuk melaksanakan kegiatan OVOP secara menyeluruh. Adanya komitmen yang tinggi terhadap Program OVOP memberikan dampak pada peningkatan sosial ekonomi, diantaranya terciptanya lapangan pekerjaan dan kesempatan berwirausaha sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga.
 3. Tahapan-tahapan kegiatan sudah dilaksanakan secara terintegrasi dan sesuai dengan kewenangannya masing-masing, meskipun terdapat indikasi tumpang tindih kewenangan dalam melaksanakan pembinaan karena belum ada batasan yang jelas dalam menentukan kategori usaha perorangan, kelompok dan industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Cole, Martin, & Parston. (2006). *Unlocking public value: New model for achieving high performance in public service organization*. New Jersey: John Willey and Sons.
- Dahlioni, L. (2009). One village one product (OVOP) tinjauan dari manajemen produksi tanaman. *Jurnal Manajemen Perkebunan*, 14-16.
- Dirjen IKM. (2012). *Buku petunjuk teknis penilaian, klasifikasi dan pembinaan produk OVOP*. Jakarta: Kementerian Perindustrian.
- Indra, Bastian. (2006). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2005). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI PRESS.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahayu, A. (2008). *Strategi meraih keunggulan dalam industri jasa pendidikan (Suatu kajian manajemen stratejik)*. Bandung: Alfabeta.
- Triharini, M., Larasati, D., & Susanto, R. (2012). Pendekatan one village one product (OVOP) untuk mengembangkan potensi kerajinan daerah: Studi kasus kerajinan gerabah di Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta. *ITB Journal*, 6 (1), 28-41.